



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/DJU/SK/HM.02.3/1/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2019**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

**4. Peraturan ....**

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara terdiri atas Kesekretariatan, Divisi Kajian dan Divisi Teknis Aplikasi.

**KETIGA ...**

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara mempunyai tugas:

1. Kesekretariatan:

- a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
- b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
- c. Menghimpun *review* atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Question (FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
- e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

2. Divisi Kajian:

- a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- c. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

3. Divisi Teknis Aplikasi:

- a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Tingkat Negeri dan Pengadilan Tinggi

**melalui ...**

- melalui media yang telah ditentukan;
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  - d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  - e. Membuat dan mengembangkan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
  - f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**HERRI SWANTORO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Padang, Banda Aceh, Surabaya, Jambi, Makassar, Tanjungkarang, Medan, Denpasar, Mataram, Bengkulu, Yogyakarta, Bandung, Kupang, Ambon, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak;
8. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Sengkang, Sidoarjo, Kualatungkal, Bengkayang, Rantau, Bontang, Dataran Hunipopu, Yogyakarta, Madiun, Sungguminasa, Praya, Oelamasi, Stabat, Lembata, Mungkid, Kabupaten Kediri, Sei Rampah, Jakarta Barat, Pasaman Barat;
9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR : 10/DJU/SK/HM.02.3/1/2019  
TANGGAL : 15 JANUARI 2019

**DAFTAR NAMA**  
**SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA**  
**(SATGAS SIPP)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>POSISI DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Herri Swantoro,S.H.,M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembina
2.	Zahlisa Vitalita,S.H	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Ketua Satgas
3.	Yayat Sudrajat, S.H.,M.H	Kasubdit Statistik dan Dokumentasi	Sekretaris 1 Satgas
4.	Lies Khadijah,S.H.,M.H.	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Sekretaris 2 Satgas
5.	Candra, S.H	Kasubdit Tata Kelola	Koordinator
6.	Achmad Basyari,S.E.	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	Kesekretariatan
6.	Leni Cahyani,S.H.,M.H.	Kepala Seksi Sarana Pengadilan	Kesekretariatan
7.	Misra Dewita,S.H.,M.H.	Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring	Kesekretariatan
7.	Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom	Kepala Seksi Statistik	Kesekretariatan
8.	Rosalia Puspa K, S.E,M.H	Kepala Seksi Tata Persidangan	Kesekretariatan
9.	Reni Kartini,S.H.	Staf Seksi Pelayanan Peradilan	Kesekretariatan
10.	Marthinalova Noll,S.Kom.	Staf Seksi Statistik	Kesekretariatan
11.	Renita Dwi Astuti,S.E.	Staf Seksi Bimbingan I	Kesekretariatan
12.	Dodon Angin Wiyono,S.Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Kesekretariatan
<b>DIVISI KAJIAN</b>			
13.	Heru Pramono,S.H.,M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Koordinator
14.	James Butar Butar SH., M.Hum	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota

15.	Agoeng Rahardjo,S.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung	Anggota
16.	Dr. Albertina Ho,S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan	Anggota
17.	Saurasi Silalahi,S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	Anggota
18.	Tony Pribadi S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Anggota
19.	Sirande Palayukan,S.H.,M.Hum.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
20.	Dwi Tomo,S.H,M.Hum	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
21.	Eka Budhi Prijanta,S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar	Anggota
22.	Harini, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Anggota
23.	Eko Aryanto,S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Anggota
24.	Rizkiansyah,S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sekayu	Anggota
25.	Mustamin,S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang	Anggota
26.	Zulfikar Berlian, S.H	Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat	Anggota
27.	Ferdian Permadi, S.H	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah	Anggota
28.	Dirgha Zaki Azizil, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Negeri Wangi-wangi	Anggota
29.	Adi Wahyono,S.H.	Panitera Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota
<b>DIVISI TEKNIS APLIKASI</b>			
30.	Jhon Hendriansyah,S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Koodinator
31.	Marisa Eka Putra,S.T.,M.Eng.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota
32.	Dona Panambayan,S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rantau	Anggota
33.	Ita Masyita, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bontang	Anggota



34.	Fransesco Palang Ama,S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	Anggota
35.	Yenny Viky Effendy ST, SH.,M.Eng	Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Yogyakarta	Anggota
36.	Aris Susilo,S.T.	Pranata Komputer Ahli Muda Pengadilan Negeri Madiun	Anggota
37.	Zeno Dani Kuncoro, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Bengkulu	Anggota
38.	Bambang Andi Saputro, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa	Anggota
39.	Imam Maxudi, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Praya	Anggota
40.	Oktein Josepus Susak, SH.MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi	Anggota
41.	Raja Muda Arif,S.Kom.	Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Stabat	Anggota
42.	Agustinus Evan Bangun M, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Mungkid	Anggota
43.	Andik Eko F, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**HERRI SWANTORO**